

Sistem Informasi Akuntansi Penginputan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Kantor Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Siti Solehah¹, Maria Magdalena Melani²

¹Universitas Djuanda, c.2210712@unida.ac.id

²Universitas Djuanda, maria.magdalen@unida.ac.id

ABSTRAK

Dalam administrasi suatu daerah, pengelolaan penggajian PNS merupakan salah-satu bagian terpenting, dimana pengelolaan penggajiannya dilakukan melalui SIPD RI. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis SIPD RI pada instansi tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme operasional, kendala dalam implementasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIPD RI memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses penggajian, meminimalkan kesalahan input manual, serta meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya pelatihan teknis, dan kendala dalam proses peralihan dari sistem sebelumnya, yaitu (SIMRAL). Pihak instansi telah melakukan berbagai langkah pemecahan, termasuk penyelenggaraan bimtek, pemanfaatan pelatihan daring, serta komunikasi aktif dengan operator pusat. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dinilai cukup baik melalui pemisahan tugas dan prosedur yang sistematis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan teknis dan penyusunan SOP tertulis guna mengoptimalkan pemanfaatan SIPD RI secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kecamatan Cijeruk, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggajian, SIPD RI, Sistem Informasi Akuntansi.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas berbagai kabupaten dan kota yang saat ini terbagi ke dalam 38 provinsi. Setiap provinsi memiliki pemerintahan daerah yang pengaturannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perkembangan teknologi digital mendorong hampir seluruh sumber daya manusia dalam organisasi untuk menggunakan sistem informasi, sehingga memperkuat integrasi antara aktivitas operasional dan struktur organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 yang merupakan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. Seiring dengan kemajuan tersebut, pemerintah pusat telah merancang dan menerapkan berbagai aplikasi guna menunjang efisiensi tata kelola administrasi daerah, salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI). Aplikasi ini bertujuan mengintegrasikan sejumlah fungsi administrasi, seperti pengelolaan anggaran, keuangan, dan penggajian, agar proses-proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan.

SIPD RI sebagai aplikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 merupakan bentuk konkret dari upaya pencapaian tujuan perencanaan pembangunan nasional. Tujuannya mencakup peningkatan koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterpaduan serta keselarasan antar wilayah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, keadilan, serta keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya.

Pemerintah daerah, termasuk Kecamatan Cijeruk, diwajibkan untuk menerapkan sistem informasi berbasis teknologi seperti SIPD RI guna mendukung kelancaran administrasi dan pengelolaan keuangan, termasuk sistem penggajian PNS, sebagaimana yang diatur dalam PP No. 65 Tahun 2010 serta Permendagri No. 70 Tahun 2019. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pembayaran gaji. Namun demikian, implementasi SIPD RI di Kantor Kecamatan Cijeruk masih menemui sejumlah tantangan. Peralihan dari sistem sebelumnya, yaitu SIMRAL, ke SIPD RI memunculkan kendala teknis,

keterbatasan sumber daya manusia, dan pemahaman yang belum optimal terkait fitur maupun kontrol internal dari sistem tersebut. Belum adanya evaluasi menyeluruh terkait tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem ini menjadi catatan penting, mengingat efektivitas suatu sistem sangat dipengaruhi oleh persepsi para penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai optimalisasi penerapan sistem dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pengelolaan penggajian yang akuntabel, efisien, dan transparan.

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Sistem Informasi Akuntansi Penginputan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor” sebagai fokus utama dalam penyusunan laporan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berfokus pada penggambaran suatu variabel secara apa adanya tanpa melakukan perbandingan atau mengkaji hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2008:11). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi sistem penggajian, termasuk tahapan prosedur yang diterapkan, hambatan yang muncul, serta elemen-elemen pendukung yang memengaruhi kelancaran pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penggajian Pada Kantor Kecamatan Cijeruk

Proses penggajian di Kantor Kecamatan Cijeruk dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi SIPD RI untuk memastikan pembayaran gaji tepat waktu, akurat, dan sesuai aturan. Gaji dibayarkan setiap tanggal 1, termasuk jika jatuh pada hari libur, guna menjamin kepastian bagi pegawai.

Proses penggajian terdiri dari sejumlah tahapan prosedural, antara lain:

1. Prosedur di Bagian Kepegawaian

Tahapan penggajian diawali dari bagian kepegawaian dengan pencatatan kehadiran sebagai dasar penilaian kinerja. Pencatatan dilakukan oleh masing-masing unit kerja, baik secara manual maupun melalui aplikasi SiCantik.

2. Prosedur di Bagian Keuangan

Sub Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di Kecamatan Cijeruk melaksanakan beberapa tahapan dalam proses penggajian:

- a. Daftar Gaji: Data gaji pegawai diperoleh dari BPKAD sebagai dasar pengolahan lebih lanjut.
- b. Rekap Gaji: Bendahara menyusun rekap gaji berdasarkan data dari BPKAD dan melakukan verifikasi ulang.
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Setelah proses rekapitulasi selesai, bendahara menyusun dokumen SPP dengan mencantumkan Nota Pencairan Dana (NPD) dan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai dokumen pendukung yang wajib dilampirkan.
- d. Surat Perintah Membayar (SPM): SPM diterbitkan untuk memproses pencairan dana gaji.
- e. Unggah Dokumen untuk TTE: Semua dokumen seperti SPP, SPM, rekap gaji, NPD, dan TBP diunggah ke aplikasi e-sign untuk ditandatangani secara elektronik oleh PA (Camat), Bendahara, dan PPTK. TTE ini mempercepat proses, menjamin keabsahan dokumen, dan mendukung sistem digital.
- f. Unggah ke Aplikasi SPEED: Dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik kemudian diunggah ke sistem SPEED untuk proses verifikasi keuangan daerah.
- g. Penerbitan SP2D: Setelah diverifikasi, BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mencantumkan jumlah gaji sesuai SPP.
- h. Pencairan Gaji: Setelah SP2D diterima dan disahkan oleh Bendahara Umum Daerah, dana gaji resmi dicairkan kepada pegawai.

Unit atau Fungsi yang Terkait

Proses penggajian melibatkan dua unit utama yang saling terintegrasi:

a. Bagian Kepegawaian

Bertanggung jawab atas pengelolaan data pegawai seperti CPNS, kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun. Juga mencatat kehadiran harian, merekap bulanan, serta melakukan rekonsiliasi data gaji secara berkala melalui aplikasi SiCantik.

b. Bagian Keuangan

Mengelola administrasi pembayaran berdasarkan data kepegawaian dan daftar gaji dari BPKAD. Menyusun rekap gaji, membuat SPP dan SPM yang ditandatangani secara elektronik, lalu mengunggahnya ke aplikasi SPEED untuk diproses hingga terbitnya SP2D sebagai dasar pencairan gaji.

Dokumen dalam Proses Penggajian

Dalam proses penggajian di Kantor Kecamatan Cijeruk, digunakan sejumlah dokumen penting untuk menjamin akurasi dan legalitas. Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Daftar Gaji Pegawai: Berisi rincian gaji bersih tiap pegawai setelah potongan (pajak, BPJS, dll), disertai kolom tanda tangan penerima.
2. Rekap Gaji: Berisi rincian total gaji pokok dan tunjangan yang telah disesuaikan dengan potongan berdasarkan golongan atau jabatan masing-masing pegawai.
3. Dokumen Perubahan Gaji: Berupa Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian terkait perubahan status kepegawaian, seperti: SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi, SK Pensiun, SK Pengangkatan PNS.
4. Konsep Gaji & Daftar Gaji Bulan Lalu: Berisi data pegawai dan jabatan, digunakan sebagai referensi penggajian bulan berjalan.

5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Dokumen pengajuan resmi pencairan dana oleh bendahara atau pejabat terkait, sebagai dasar administrasi pembayaran.
6. Surat Perintah Membayar (SPM): Dikirim ke Kas Daerah, berisi informasi pegawai, jumlah SPP, potongan, dan NPD serta TBP.
7. Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui aplikasi *e-sign*: Diperlukan untuk pengesahan dokumen secara hukum agar sah dalam sistem digital.
8. Aplikasi SPEED: Digunakan untuk mengunggah dan memverifikasi dokumen penggajian secara elektronik, mempercepat proses pencairan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D): Merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh BPKAD sebagai instruksi pencairan dana, setelah dokumen SPM melewati proses verifikasi.
10. Slip Gaji: Menampilkan rincian akhir gaji bersih yang diterima pegawai, sesuai dengan daftar gaji dan potongan resmi.

Sistem Penggajian di Kantor Kecamatan Cijeruk

Kecamatan Cijeruk menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) untuk mengelola data penggajian. Sistem ini dikembangkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, dan Permendagri No. 70 Tahun 2019. SIPD RI mendukung pengelolaan keuangan daerah secara terpadu—mulai dari penganggaran hingga pelaporan—dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Keunggulan SIPD RI:

1. Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan secara cepat dan terstruktur.
2. Mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
3. Memudahkan akses data bagi pengambil kebijakan untuk mendukung keputusan berbasis informasi.

4. Terintegrasi dengan sistem pengadaan LKPP, sehingga sinkron antara penganggaran dan pengadaan barang/jasa.



Sumber: SIPD Kemendagri, 2025

Sistem informasi akuntansi penggajian di Kantor Kecamatan Cijeruk dibuat untuk menjamin kelancaran, ketepatan, dan efisiensi dalam proses pembayaran gaji. Sistem ini meliputi pencatatan data pegawai, perhitungan gaji yang didasarkan pada kehadiran dan kinerja, hingga proses pembayaran yang telah terintegrasi dengan layanan perbankan.. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi fitur pelaporan yang mendukung manajemen dalam memantau dan mengevaluasi proses penggajian. Fitur ini membantu meningkatkan akurasi, efektivitas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan Proses Penggajian Melalui SIPD RI

Menurut Modul Penatausahaan SIPD RI, proses penggajian di Kantor Kecamatan Cijeruk dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam aplikasi SIPD RI untuk menjamin efisiensi dan akuntabilitas keuangan daerah.

1. *Login/Masuk*

Pengguna wajib masuk ke sistem menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai identitas resmi. Akses ke SIPD RI dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang, seperti: Bagian Program dan Pelaporan Keuangan, Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Pengguna Anggaran (PA), Bendahara, PPTK. Kepala Seksi (Kasi) terkait. Pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan data dan memastikan setiap proses dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai tugasnya.

2. *Upload* Data Pegawai

Pengunggahan data pegawai di SIPD RI dilakukan melalui menu "Pengajuan", lalu memilih submenu "Data Pegawai" dan masuk ke bagian "Gaji". Pada bagian ini, tersedia fitur "Upload Data" yang digunakan untuk mengunggah file Excel berisi informasi pegawai terkait penggajian. Langkah ini merupakan tahapan awal dalam administrasi penggajian untuk memastikan seluruh pegawai tercantum dalam sistem.

3. Pembuatan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Untuk membuat SPP di SIPD RI, pengguna masuk ke menu "Pengeluaran", pilih submenu "SPP", lalu klik "LS" (Langsung). Selanjutnya, klik "Tambah Surat Permintaan Pembayaran – LS Barang & Jasa" untuk membuka formulir baru. Formulir ini harus diisi dengan data seperti nama kegiatan, nomor dokumen, tanggal pengajuan, tujuan pembayaran, nama penerima, dan uraian pembayaran. Proses ini memastikan pengajuan dana dilakukan secara lengkap dan sesuai prosedur administratif.

4. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)

Langkah pembuatan SPM dimulai dengan memilih menu Pengeluaran, kemudian dilanjutkan dengan memilih SPM dan Pembuatan SPM. Setelah SPM selesai dibuat, proses selanjutnya adalah pembuatan LS (Laporan SPP). Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pencetakan SPP yang terkait, disusul oleh pencetakan SPM yang sudah disetujui. Setelah SPM tercetak, tahapan berikutnya yaitu pencetakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak), kemudian dilanjutkan dengan pencetakan pernyataan yang dibutuhkan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah terakhir adalah mencetak

data gaji sebagai rincian dari proses penggajian yang tengah berjalan. Dengan melaksanakan prosedur tersebut.

5. Upload TTE ke SPEED

Setelah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) selesai dilengkapi, tahap selanjutnya adalah menunggu proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat selaku Pengguna Anggaran (PA), Bendahara, dan PPTK. Proses TTE ini menjadi bagian penting dalam pengesahan dokumen SPM agar diakui secara legal dan administratif. Setelah seluruh pihak terkait memberikan tanda tangan elektronik, dokumen yang telah ditandatangani kemudian diunggah ke dalam aplikasi SPEED, yaitu sistem pencairan cepat yang dirancang untuk mempercepat proses pengeluaran dana. Setelah pengunggahan selesai, pengguna hanya perlu menunggu proses verifikasi dari BPKAD.

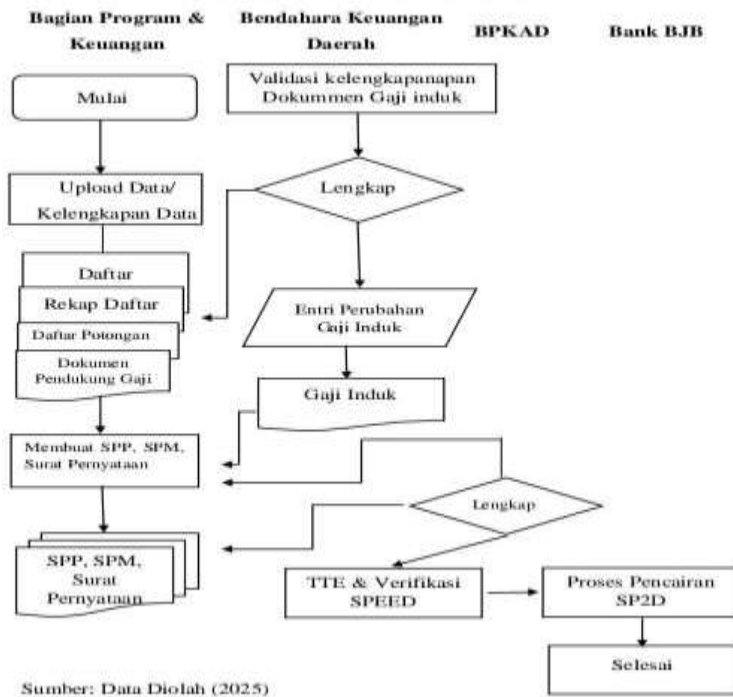
6. Verifikasi SP2D

Setelah semua dokumen dinyatakan lengkap dan valid, sistem akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai tanda bahwa dana telah siap dicairkan dan proses pembayaran gaji dapat dilakukan.

Bagan Alir (Flowchart)

3.3.7 Bagan Alir (Flowchart)

Tabel 3. 4 Bagan Alir (Flowchart)



Kendala dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Sebelum penggunaan aplikasi digital, penggajian di Kecamatan Cijeruk dilakukan manual, yang rawan kesalahan perhitungan dan lambat dalam penyusunan slip gaji. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mulai menerapkan SIPD RI, sistem keuangan daerah terintegrasi yang menggantikan SIMDA dan SIMRAL.

Sebelum penggunaan aplikasi digital, penggajian di Kecamatan Cijeruk dilakukan manual, yang rawan kesalahan perhitungan dan lambat dalam penyusunan slip gaji. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mulai menerapkan SIPD RI, sistem keuangan daerah terintegrasi yang menggantikan SIMDA dan SIMRAL.

Namun, dalam pelaksanaannya, SIPD RI masih menghadapi beberapa kendala:

1. Stabilitas sistem yang rendah: Server sering lambat atau down, sehingga membatasi akses pengguna hanya sekitar 15–30 menit per jam. Hal ini menghambat input data dan keterlambatan pembayaran gaji.

2. Kurangnya pemahaman pegawai: Terbatasnya pelatihan dan bimbingan teknis membuat pengguna belum optimal dalam memanfaatkan fitur sistem.
3. Keterlambatan penerbitan SP2D: Terutama di akhir bulan atau akhir tahun anggaran, karena beban kerja tinggi dan keterbatasan waktu pejabat penandatanganan.

Solusi yang diterapkan meliputi pelatihan daring, panduan internal, serta BIMTEK dari BPKAD. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) juga membantu mempercepat proses tanpa perlu pengiriman dokumen fisik. Secara keseluruhan, meskipun masih dalam tahap penyempurnaan, SIPD RI telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pengelolaan penggajian. Dukungan pengendalian internal dan upaya perbaikan berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan teknis serta kesiapan menghadapi perubahan regulasi.

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Kantor Kecamatan Cijeruk menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) untuk memastikan proses penggajian berjalan tertib, akurat, efisien, dan bebas dari penyimpangan. SPI diterapkan melalui:

1. Struktur Organisasi yang Jelas
Pemisahan tugas antara bagian kepegawaian, keuangan, dan bendahara menjadi bentuk pengendalian awal untuk mencegah konflik kepentingan.
2. Prosedur Berjenjang
Proses penggajian mengikuti alur dari input SIPD RI, pembuatan SPP dan SPM, hingga verifikasi dokumen melalui TTE oleh PA, PPTK, dan Bendahara, sebelum diunggah ke aplikasi SPEED.
3. Penggunaan Sistem Digital (SIPD RI & SPEED)
Sistem memiliki fitur audit trail untuk mencatat semua aktivitas pengguna, memudahkan pelacakan jika terjadi kesalahan atau manipulasi.
4. Verifikasi dan Legalitas Dokumen

Semua dokumen wajib diperiksa secara administratif dan hukum sebelum pencairan dilakukan.

5. Pengawasan Internal dan Evaluasi Berkala

Dilakukan oleh Kasubag Keuangan dan Sekretaris Camat, terutama untuk mengecek data pegawai, realisasi anggaran, dan efektivitas penggunaan aplikasi.

Evaluasi SPI Berdasarkan Kerangka COSO

SPI di Kecamatan Cijeruk juga sejalan dengan lima komponen pengendalian menurut COSO:

- a. Lingkungan Pengendalian: Mencakup integritas manajemen, struktur organisasi, dan kebijakan SDM.
- b. Penilaian Risiko: Mengidentifikasi dan menanggulangi risiko yang menghambat tujuan organisasi.
- c. Kegiatan Pengendalian: Meliputi prosedur manual maupun otomatis untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan.
- d. Informasi dan Komunikasi: Menjamin informasi akurat tersedia untuk pengambilan keputusan, baik secara internal maupun eksternal.
- e. Pemantauan: Melibatkan pemantauan harian, evaluasi berkala, dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama menjalani Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Kecamatan Cijeruk, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem Informasi Akuntansi penginputan gaji di Kantor Kecamatan Cijeruk telah menggunakan aplikasi SIPD RI, yang mendukung proses penggajian secara digital mulai dari input data pegawai hingga pencairan dana. Prosedur dimulai dari verifikasi data pegawai, pembuatan SPP dan SPM, tanda tangan elektronik melalui TTE, hingga pengunggahan dokumen ke aplikasi SPEED.

Catatan dan dokumen yang digunakan meliputi BKU, Register SPP, SPM, SPJ, Daftar Gaji, dan SK Pegawai. Dari sisi pengendalian internal, telah diterapkan pemisahan tugas antara kepegawaian, keuangan, dan bendahara, serta adanya verifikasi dan otorisasi berlapis menggunakan sistem digital. Proses ini terekam dalam SIPD RI yang memiliki audit trail, sehingga mendorong akurasi dan akuntabilitas.

2. Kendala yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan SDM dalam penguasaan aplikasi SIPD RI yang terkadang menjadi salah satu penyebab Human Error, gangguan teknis pada sistem, belum tersusunnya SOP tertulis secara menyeluruh, dan ketergantungan terhadap jaringan internet atau server pusat. Hal ini dapat mempengaruhi kelancaran proses penginputan dan pencairan gaji.
3. Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) di Kantor Kecamatan Cijeruk dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui pemisahan tugas yang jelas antar bagian, prosedur verifikasi berlapis, serta penggunaan sistem digital seperti SIPD RI dan TTE yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2024). **Luas wilayah (Km²)**, 2021–2023.

<https://bogorkab.bps.go.id/>

Panduan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). (2016). Bogor. Fakultas Ekonomi-Universitas Djuanda Bogor. (2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. (2023). Dikutip dari

<https://contohweb.banjarmasinkota.go.id/2023/03/peraturan-pemerintah-nomor-17-tahun.html>

Sugiyono. (2008). **Metode penelitian bisnis**. Alfabeta: Bandung